

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2022

Jl. Janti No. 66 Banguntapan

Bantul - DI Yogyakarta 55198

Telp. (0274) 520502 Fax. (0274) 581675

e-mail : jogjakarta@ptun.org



**LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022
(Audited)**

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022

BAGIAN ANGGARAN 005.05

BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Janti No. 66 Banguntapan

Telp. (0274) 520502 Fax. (0274) 581675

Bantul - DI Yogyakarta 55198

e-mail : jogjakarta@ptun.org

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bantul, Mei 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

BUDI SURYANA, S.H.
NIP.196702131988031002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	4
Pernyataan Tanggung Jawab.....	6
Ringkasan.....	8
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	11
II. Neraca.....	14
III. Laporan Operasional.....	16
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	19
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	21
A. Penjelasan Umum.....	21
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	30
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	32
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	33
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	38
VI. Daftar dan Lampiran.....	43
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap.....	44
Daftar Hibah Langsung.....	46

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Jl. Janti No. 66 Banguntapan Bantul - DI Yogyakarta 55198
Telp. (0274) 520502 Fax. (0274) 581675 email : jogjakarta@ptun.org

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan pada 31 Desember Tahun Anggaran 2022 - Audited sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bantul, Mei 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

BUDI SURYANA, S.H.
NIP.196702131988031002

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 .

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 4.363.900.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember TA 2022 adalah sebesar Rp 33.030.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Nilai Aset per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp 0 dan Rp 0, yang terdiri dari: Aset Lancar yang terdiri atas Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 0 dan Rp 0 dan persediaan sebesar Rp 0 dan Rp 0 ; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 0 ; Kewajiban yang terdiri atas Utang Yang belum Ditagihkan sebesar Rp 0 dan Rp 0 dan Uang Muka dari KPPN sebesar Rp 0 dan Rp 0. Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp 0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO

untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 4.363.900, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 46.829.028 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp (42.465.128) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp 0 dan surplus(defisit) sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp (42.465.128).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp 0 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp (42.465.128) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 42.465.128 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp 0.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 - AUDITED
(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2022				2021			
		Anggaran	Realisasi	Realisasi Di Atas (Di Bawah)	% Realisasi	Anggaran	Realisasi	Realisasi Di Atas (Di Bawah)	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	0	4.363.900	4.363.900	0,00	5.600.000	3.891.500	(1.708.500)	69,491
	Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak	0	4.363.900	4.363.900	0,00	5.600.000	3.891.500	(1.708.500)	69,491
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	4.363.900	4.363.900	0,00	5.600.000	3.891.500	(1.708.500)	69,491
B	BELANJA								

	BELANJA	37.030.000	33.662.000	(3.368.000)	91,00	39.600.000	30.568.700	(9.031.300)	77,00
	Belanja Pegawai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Belanja Barang	37.030.000	33.662.000	(3.368.000)	91,00	39.600.000	30.568.700	(9.031.300)	77,00
	Belanja Modal	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	JUMLAH BELANJA	37.030.000	33.662.000	(3.368.000)	91,00	39.600.000	30.568.700	(9.031.300)	77,00
C	PEMBIAYAAN								
	JUMLAH PEMBIAYAAN				0				0

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
NERACA
PER 31 Desember 2022 DAN 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	Jumlah		Kenaikan (penurunan)	
	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
Jumlah Aset	0	0	0	0,00
KEWAJIBAN				
Jumlah Kewajiban	0	0	0	0,00
EKUITAS				
Jumlah Ekuitas Dana	0	0	0	0
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	0	0	0	0

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 Desember 2022 DAN 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (penurunan)	
	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Jumlah	%
1	2	3	3	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	0,00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	4.363.900	3.891.500	472.400	12,139
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	4.363.900	3.891.500	472.400	12,139
JUMLAH PENDAPATAN (A)	4.363.900	3.891.500	472.400	12,139
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Persediaan	15.321.838	19.041.275	(3.719.447)	(19.534)
Beban Barang dan Jasa	31.298.700	28.693.500	2.605.200	9,079
Beban Pemeliharaan	208.500	1.598.575	(1.390.075)	(86.957)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL (B)	46.829.028	49.333.350	(2.504.322)	(5.076)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (C=A-B)	(42.465.128)	(45.441.850)	2.976.722	(6.551)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS (DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	0	0	0	0,00
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0,00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0	0	0,00

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0,00
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (D)				
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (E=C+D)	(42.465.128)	(45.441.850)	2.976.722	(6.551)
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0	0		
Jumlah Pos Luar Biasa (F)	0	0		
SURPLUS/(DEFISIT) – LO (E+F)	(42.465.128)	(45.441.850)	2.976.722	(6.551)

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2022 DAN 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

No	URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		31 Desember 2022	31 Desember 2021	JUMLAH	%
1	2	3	4	5=3-4	6
	Ekuitas Awal	0	0		
	Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(42.465.128)	(45.441.850)	2.976.722	-
	Transaksi Antar Entitas	42.465.128	45.441.850	(2.976.722)	-
	Kenaikan/Penurunan Ekuitas	0	0	0	-
	Ekuitas Akhir	0	0	0	0,00

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah "TERWUJUDNYA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA YANG AGUNG". Visi dimaksud bermakna sebagai berikut: menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilakukan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
2. Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya sesuai visi dan misi yang telah ditentukan membuat beberapa langkah-langkah strategis yang tercakup dalam program utama 2020-2024 sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Program utama tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk beberapa kegiatan pokok, sebagai berikut:

- a. Penyelesaian perkara baru.
- b. Penyelesaian sisa perkara.
- c. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
- d. Penyelesaian kelengkapan berkas banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
- e. Penyampaian Pemberitahuan Pemanggilan Sidang.
- f. Penyampaian Pemberitahuan Relas putusan .
- g. Pelaksanaan diklat teknis non yudisial.
- h. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
- i. Tindak lanjut temuan yang masuk.
- j. Publikasi proses penyelesaian perkara.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

(1.) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(2.) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
Pendapatan				
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Peradilan	0	140.000	0,00
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	0	890.000	0,00
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lain	0	3.333.900	0,00
Total Pendapatan		0	4.363.900	0,00

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada 31 Desember TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 472.400 atau 12,139 persen dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan karena tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Perbandingan realisasi PNBPA TA 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBPA per 31 Desember TA 2022 dan 31 Desember TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2022	2021	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	140.000	280.000	(140.000)	(50)
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	890.000	960.000	(70.000)	(7,291)
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	3.333.900	2.651.500	682.400	25,736
Total Pendapatan		4.363.900	3.891.500	472.400	12,139

B.1. Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara :
Rp
33.662.000*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta per 31 Desember TA 2022 adalah sebesar Rp. 33.662.000 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 91% dari anggaran senilai Rp. 37.030.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 31 Desember TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2022

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2022		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	37.030.000	33.662.000	91,00
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	37.030.000	33.662.000	91,00
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	37.030.000	33.662.000	91,00

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp 3.093.300 atau sebesar 10,119 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena: maksimal dalam penyerapan belanja jasa konsultasi belanja bahan non operasional pengamanan sidang.

Perbandingan realisasi belanja TA 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2022 dan Desember TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	33.662.000	30.568.700	3.093.300	10.119
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	33.662.000	30.568.700	3.093.300	10.119

B.1.1 Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang : Rp
33.662.000*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta per 31 Desember TA 2022 dan 31 Desember TA 2021 adalah sebesar Rp. 33.662.000 dan Rp. 30.568.700.

Realisasi Belanja Barang pada 31 Desember TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 10.119 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain: karena maksimalnya penyerapan belanja jasa konsultasi dan belanja barang non operasional pengamanan sidang.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2022 dan 31 Desember TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Non Operasional	2.498.700	493.500	2.005.200	406,322
Belanja Barang Persediaan Konsumsi	2.363.300	1.875.200	488.100	26,029
Belanja Jasa	28.800.000	28.200.000	600.000	2,127
Total Belanja Brutto	33.662.000	30.568.700	3.093.300	10,119
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	33.662.000	30.568.700	3.093.300	10,119

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset: Rp 0

Aset

Pengadilan Tata Usaha Negara pada periode sampai dengan 31 Desember 2023 tidak memiliki aset.

*Kewajiban: Rp
0*

Kewajiban

Pengadilan Tata Usaha Negara pada periode sampai dengan 31 Desember 2023 tidak memiliki kewajiban yang harus diselesaikan.

Ekuitas: Rp 0

Ekuitas

Pengadilan Tata Usaha Negara pada periode sampai dengan 31 Desember 2023 tidak memiliki Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
PNBP : Rp
4.363.900

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 4.363.900 dan Rp 3.891.500. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember TA 2022 dan 31 Desember TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Naik(turun)%
1	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	140.000	280.000	(50,00)
2	Pendapatan Ongkos Perkara	890.000	960.000	(7,291)
3	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	3.333.900	2.651.500	25,736
	Total Pendapatan	4.363.900	3.891.500	12,139

D.2. Beban Persediaan

Beban
Persediaan :
Rp 15.321.828

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 15.321.828 dan Rp 19.041.275. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2022 dan 31 Desember TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Naik(turun)%
1.	Beban Persediaan Konsumsi	15.321.828	19.041.275	(19,533)
	Total	15.321.828	19.041.275	(19,533)

D.3. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
Jasa : Rp
31.298.700*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 dan 30 September 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 31.298.700 dan Rp 28.693.500. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)%
Beban Jasa Konsultasi	28.800.000	28.200.000	2,127
Beban Bahan	2.498.700	493,500	406,322
Total Beban Jasa	31.298.700	28.693.500	9,079

D.4. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
: Rp 208.500*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 208.500 dan Rp 1.598.575. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 September TA 2022 dan TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)%
Beban Persediaan Barang untuk Pemeliharaan	208.500	1.598.575	(86,957)
Total Beban Pemeliharaan	208.500	1.598.575	(86,957)

D.5. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp 0

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional

per 31 Desember TA 2022 dan 31 Desember TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0
Penjualan Alat Kantor			
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0

D.6. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa

per 31 Desember TA 2022 dan 31 Desember TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)%
Pendapatan PNB	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 dan 01 Januari 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

E.2. Surplus (defisit) LO

*Surplus (defisit)
LO : Rp
(42.465.128)*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp (42.465.128) dan Rp (45.441.850). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas: Rp
42.465.128*

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 42.465.128 dan Rp 45.441.850.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas

per 31 Desember TA 2022

(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(4.363.900)
Ditagihkan ke Entitas Lain	33.662.000
Transfer Masuk	13.167.028
Jumlah	42.465.128

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp (4.363.900) sedangkan DKEL sebesar Rp 33.662.000

Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lainnya pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 13.167.028

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Persediaan	Dirjen Badimiltun	13.167.028

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK hingga akhir tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2022 yang harus ditindak lanjuti

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak terdapat Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual yang dapat dijabarkan hingga akhir tanggal 31 Desember 2022.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah:

1. BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta A/C 0029-01-001324-30-8 a.n. BPG 030 PTUN YOGYAKARTA 05 digantikan dengan Virtual Account dengan nomor rekening 651555788021000 a.n. BPG 030 PTUN Yogyakarta yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILMILTUN dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0.
2. BRI Yogyakarta Katamso A/C 00000245-01-001579-30-7 a.n. RPL 030 PTUN Yogyakarta yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.731.649.

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Selama periode pelaporan (1 Januari s/d 31 Desember 2022) di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta terdapat saldo uang titipan pihak ketiga (Panjar Biaya Perkara) sebesar Rp 2.525.000 yang terinci sebagai berikut:

- Saldo Awal (1 Januari 2022)

-	Uang Panjar Biaya Perkara	: R	6.457.045
		p	
-	Uang Panjar Biaya Eksekusi	: R	0
		p	
-	Uang Konsinyasi	: R	0
		p	
	Jumlah	: R	6.457.045
		p	

- Penerimaan dari 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2022

-	Uang Panjar Biaya Perkara	: R	23.342.500
		p	
-	Uang Panjar Biaya Eksekusi	: R	0
		p	
-	Uang Konsinyasi	: R	0
		p	
-	Uang Pemeriksaan Setempat	: R	0
		p	
	Jumlah Penerimaan	: R	23.342.500
		p	
	Jumlah Saldo Awal dan Penerimaan	: R	29.799.545
		p	

- Pengeluaran dari 1 Januari s/d 31 Desember 2022

-	Uang Panjar Biaya Perkara	: R	27.274.545
		p	
-	Uang Panjar Biaya Eksekusi	: R	0
		p	
-	Uang Konsinyasi	: R	0
		p	
-	Uang Pemeriksaan Setempat	: R	0
		p	
	Jumlah Pengeluaran	: R	27.274.545
		p	
	Saldo per 31 Desember 2022	: R	2.525.000
		p	
	Keterangan :		
	Saldo Bank	: R	1.731.649
		p	
	Saldo Kas	: R	793.351
		p	
	Jumlah Pengeluaran sebesar Rp 27.274.545 dipergunakan sebagai berikut:		
	● Uang Panjar Biaya Perkara meliputi :		
1.	Biaya Panggilan	: R	1.980.000
		p	
2.	Hak-Hak Kepaniteraan	: R	1.543.400
		p	
3.	Biaya Pemberitahuan	: R	600.000
		p	
4.	Pengiriman Biaya Perkara	: R	2.492.000
		p	

5.	Pengembalian Sisa Panjar	: R	9.246.500
		p	
6.	ATK	: R	5.814.500
		p	
7.	Redaksi dan Leges	: R	400.000
		p	
8.	Materai	: R	230.000
		p	
9.	PNBP Panjar Perkara	: R	1.603.000
		p	
10	Lain-lain	: R	3.365.145
.		p	
	Jumlah	: R	27.274.545
		p	
	● Uang Pemeriksaan Setempat		
1.	Pemeriksaan Setempat	: R	0
		p	
	Jumlah	: R	0
		p	

F.2.5. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Revisi I DIPA pada tanggal 07 April 2022 merevisi Hal III Rencana Penarikan..
2. Revisi II DIPA pada tanggal 08 Juli 2022 merevisi Hal III Rencana Penarikan
3. Revisi III DIPA pada tanggal 07 Oktober 2022 merevisi Hal III Rencana Penarikan

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP,SSPB: hingga akhir bulan Desember TA 2022 tidak ada ralat spm

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada perubahan Pengelola Keuangan hingga akhir Bulan Desember 2022.

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN,
DAN NILAI BUKU ASET
TETAP*

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2022

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan		Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2021	2022		
						Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2022
A.	Peralatan dan Mesin						
B.	Gedung dan Bangunan						
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
D.	Aset Tetap Lainnya						
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan						
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap						
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya						

Daftar Hibah Langsung

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2022

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
			Jumlah :				